

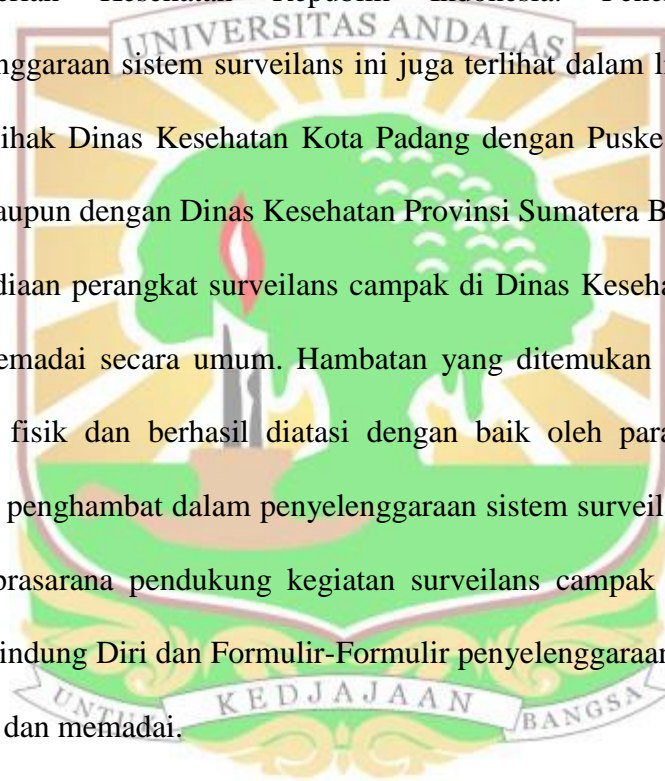
## BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis input sistem surveilans campak (*Measles*) di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemegang program surveilans berjumlah 4 orang dengan latar belakang pendidikan sebagian besar adalah Sarjana Kesehatan Masyarakat serta telah memadai dari segi peraturan dan penyelenggaraannya. Pemegang program surveilans memperoleh pelatihan dalam bentuk kegiatan peningkatan kompetensi yang diadakan secara rutin. Hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kota Padang sebagai fasilitator pelatihan adalah anggaran dana yang kurang memadai. Tiap pemegang program surveilans telah diberi tanggung jawab secara merata tanpa ada beban kerja yang ganda sehingga akan memudahkan pekerjaan dan menghindari kemungkinan terjadinya hambatan saat mengemban tanggung jawab. Pekerjaan juga dilakukan bersama-sama dengan lintas program untuk mempermudah pencapaian indikator kinerja. Hambatan pada penyelenggaraan surveilans campak terlihat pada level Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai institusi pelaksana yang mengemban tugas berganda sehingga berdampak kepada penurunan penyelenggaraan sistem surveilans dan layanan imunisasi. Hambatan ini mempengaruhi kualitas, ketepatan, dan kelengkapan data yang didiseminasikan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit terhadap Dinas Kesehatan Kota Padang sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan penanggulangan campak.

2. Sumber dana surveilans campak berasal dari BOK dan APBD yang tergabung ke dalam pendanaan surveilans dan pada tahun 2022 terjadi rasionalisasi pendanaannya sehingga berdampak kepada penurunan pengadaan anggaran terkhususnya pada aktivitas perjalanan dinas dan pengadaan pelatihan.
3. Penyelenggaraan sistem surveilans campak di Dinas Kesehatan Kota Padang telah merujuk dengan baik kepada pedoman-pedoman yang tersedia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penerapan pedoman penyelenggaraan sistem surveilans ini juga terlihat dalam lingkaran koordinasi antara pihak Dinas Kesehatan Kota Padang dengan Puskesmas dan Rumah Sakit maupun dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
4. Ketersediaan perangkat surveilans campak di Dinas Kesehatan Kota Padang telah memadai secara umum. Hambatan yang ditemukan yaitu kekurangan fasilitas fisik dan berhasil diatasi dengan baik oleh para staff dan tidak menjadi penghambat dalam penyelenggaraan sistem surveilans. Ketersediaan sarana prasarana pendukung kegiatan surveilans campak yang terdiri atas Alat Pelindung Diri dan Formulir-Formulir penyelenggaraan surveilans telah lengkap dan memadai.



## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diberikan, sebagai berikut:

### 6.2.1 Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang

1. Memaksimalkan kinerja pemegang program surveilans di tingkat Puskesmas dan Rumah Sakit untuk mengatasi kekurangan ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di lingkungan kerja Dinas Kesehatan Kota Padang.
2. Melakukan pengadaan pelatihan berstandar secara rutin setiap tahunnya kepada sasaran petugas-petugas surveilans di tingkat Puskesmas dan Rumah Sakit.
3. Melakukan pengadaan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perangkat penyelenggaraan sistem surveilans terutama komputer dan mesin pencetak.
4. Melakukan pengadaan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana fisik di ruang kantor Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, seperti meja dan kursi.

### 6.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penggalan informasi yang lebih mendalam mengenai manajemen input sistem surveilans campak dari aspek Sumber Daya Manusia, Penganggaran, Metode, maupun Sarana-Prasarana sehingga dapat lebih menilai keberhasilan maupun hambatan secara lebih mendalam dan akan memberikan dampak kepada peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem surveilans yang dihasilkan.